

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan saat ini merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang mengatur tentang perbankan, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak. Selain itu, perbankan juga menjadi suatu Lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat saat ini untuk mentipkan sejumlah uang. Lembaga keuangan perbankan dalam hal ini mempunyai kegiatan utama yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan yang dapat dipersamakan dengan hal itu serta Bank menyalurkan dana nya kembali dalam bentuk pinjaman/kredit.

Salah satu kegiatan Bank yang sangat penting dan utama adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, baik kredit untuk perorangan, Lembaga/Instansi maupun kredit Perusahaan. Penyaluran kredit iu sendiri diperuntukkan bagi masyrakat yang membutuhkan dana, misalnya dana hasil kredit tersebut untuk membangun suatu usaha, kepemilikan rumah atau membeli kendaraan bermotor dan kepentingan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Namun dalam hal pemberian kredit tersebut harus terjalin kesepakatan antara debitur(pihak pemohon kredit) dengan kreditur (pihak pemberi krdit) dalam memenuhi setiap hak dan kewajiban dari masingmasing pihak agar kredit tersebut bisa terrealisasi sebagaimana mestinya.

Selain dari kegiatan apasaja yang dilakukan, Bank juga memiliki suatu tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendorong laju usaha, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan menyalurkan kredit kepada para pengusaha kecil dengan memprioritaskan masyarakat yang memiliki suatu usaha, agar masyarakat tersebut bisa menggunakan dana hasil kredit tersebut untuk mengembangkan usaha dan melakukan perluasan usaha dengan membuka cabang-

cabang usaha di setiap daerah. Sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat.

Dalam penyaluran kredit, begitu banyak fasilitas yang ditawarkan oleh pihak bank sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masing-masing pemohon kredit itu sendiri. Salah satunya seperti Fasilitas Kredit Guna Bhakti (KGB) yang merupakan salah satu jenis produk kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Fasilitas KGB merupakan fasilitas pemberian kredit yang diperuntukan bagi karyawan/pegawai yang memiliki penghasilan tetap seperti PNS, dimana gajinya tersebut telah disalurkan melalui Bank Jabar dan Banten sebagai sumber pembayar utama yang berasal dari penghasilan gaji pokok tersebut. Adapun kegunaan dari KGB tersebut bias digunakan untuk berbagai keperluan seperti membangun usaha, memperluas usaha, pembelian tanah, renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor dan lain sebagaimana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemohon.

Maka dari itu, Penulis yang telah melakukan Praktik Kerja Lapangan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Fatmawati menaruh minat untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai prosedur pemberian Kredit Guna Bhakti (KGB) itu sendiri, untuk itu penulis tertarik untuk membuat laporan Tugas Akhir dengan judul **“Mekanisme Proses Pemberian Kredit Guna Bhakti Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Fatmawati.”**

1.2 Ruang Lingkup Praktik

Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh penulis pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Fatmawati yaitu pada bagian Kredit membahas tentang Kredit Guna Bhakti.

Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama melakukan Praktik Kerja adalah sebagai berikut :

1. Membantu menyiapkan berkas permohonan Kredit Guna Bhakti (KGB).
2. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan calon debitur Kredit Guna Bhakti (KGB).

3. Memperhatikan proses BI checking pada laman SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK terhadap nasabah calon debitur Kredit Guna Bhakti (KGB).
4. Memperhatikan proses wawancara kepada calon debitur perihal kesanggupan dalam memenuhi syarat dan ketentuan permohonan Kredit Guna Bhakti (KGB).
5. Memperhatikan penginputan data dan informasi calon debitur ke dalam Loan Management System (LMS) milik Bank Jabar dan Banten.
6. Memperhatikan proses perhitungan pemotongan gaji calon debitur PNS yang gajinya dikelola oleh Bank Jabar dan Banten.
7. Memperhatikan proses akad Kredit Guna Bhakti pada Bank Jabar dan Banten.

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada PT. Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk. Di Kantor Cabang Pembantu Fatmawati adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Tujuan Umum dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Fatmawati adalah untuk mengetahui mekanisme kerja dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Fatmawati itu sendiri.

2. Tujuan Khusus

Melalui Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan penulis pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Fatmawati dalam pelaksanaannya penulis diberi arahan dan bimbingan oleh seorang Account Officer (AO) dari pihak bank tersebut. Adapun arahan dan tugas-tugas yang penulis laksanakan selama periode Praktik Kerja Lapangan, yaitu :

- a. Membantu mempersiapkan kelengkapan berkas Kredit Guna Bhakti. Hal ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian data-data calon debitur sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.

- b. Melakukan BI Checking pada laman Sitem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK terhadap calon debitur, untuk mengetahui informasi keuangan calon debitur apakah termasuk kategori Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Diragukan (D) atau Macet (M) serta apakah calon debitur masuk kedalam daftar hitam atau tidak.
- c. Melakukan pengimputan data-data calon debitur yang telah terverifikasi ke dalam Loan Management System (LMS). Yaitu merupakan proses dimana dapat dikatakan bahwa permohonan kredit calon debitur telah di setujui dan hasil pengimputan LMS nantinya akan dikirimkan ke Kantor Cabang agar dapat menerbitkan Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) dan Analisis Keputusan Kredit.
- d. Memperhatikan proses perhitungan pemotongan gaji calon debitur PNS yang gajinya dikelola oleh Bank Jabar dan Banten.
- e. Memperhatikan proses berlangsungnya Akad Pemberian Kredit Guna Bhakti (KGB). Dimana sebelum nasabah menandatangani Perjanjian Kredit, Account Officer akan menjelaskan ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon debitur dan hak yang akan diterima oleh calon debitur. Setelah tercapai kesepakatan antara debitur dan kreditur maka calon debitur dianjurkan untuk menandatangani Perjanjian Kredit sebagai bukti bahwa calon debitur menyanggupi semua ketentuan dan kewajiban yang telah ditentukan oleh pihak Bank BJB.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat yang diharapkan penulis dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yaitu :

1. Sebagai pembelajaran dan bahan pembanding antara Teori yang telah dipelajari dengan Praktik langsung dilapangan.
2. Memberikan pengalaman kepada penulis dengan melakukan praktik langsung di lapangan terhadap apa yang dikerjakan dalam Praktik Kerja Lapangan.
3. Menambah wawasan dan pemahaman mekanisme proses pemberian Kredit khususnya Kredit Guna Bhakti (KGB).

4. Dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan pemberian kredit yang tepat.
5. Memberikan gambaran secara umum bagi penulis atas profesi yang akan digeluti kedepannya dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi ilmiah yang relevan.

1.5 Sejarah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan milik Belanda di Indonesia yang di kenal nasionalisasi. Bank Jawa Barat dan Banten telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Mei 1961 hal ini merupakan salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yaitu N.V Denis (De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding).

Bank Jawa Barat dan Banten sebelum mengukuhkan namanya seperti sekarang ini, Bank Jawa Barat dan Banten telah berganti nama seperti sebagai tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1960, dengan surat Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 7/GKDN/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 dengan nama PT. Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat, akan tetapi dengan kedudukan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11/PD/DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972, PT. Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat diubah menjadi PD. Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat. Nama PD. Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat selanjutnya diubah sesuai Perda Provinsi Jawa Barat No. 1/DP-040/PD/1978 Tanggal 27 Juni 1978. Pada tahun 1992 sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 status BPD Jabar meningkat menjadi bank umum devisa sehingga diubah menjadi BPD Jabar. Dan selanjutnya BPD Jabar memiliki sebutan Bank Jabar berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1995 dengan memiliki logo baru.

Pada tanggal 14 Desember 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 22 Tahun 1998, dimana hal tersebut juga telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7103.HT.01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999, serta sesuai No.39 tanggal 14 Mei

1999, Tambahan No. 2811 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia yaitu bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Sesuai dengan izin BI No. 2/18/ DPG/DPIP Tanggal 12 April 2000 maka Bank Jabar menjadi BPD pertama di Indonesia yang memberikan pelayanan perbankan dalam bentuk konvensional dan syariah/dual banking system sejak tanggal 15 April 2000 hal ini guna meningkatkan pemenuhan atas kebutuhan masyarakat akan jasa layanan perbankan.

Selanjutnya pada tanggal 16 April 2001 mengenai penyetujuan peningkatan modal dasar Bank Jawa Barat dan Banten dimana sebelumnya Rp.1 triliun menjadi Rp.2 triliun hal ini sesuai dengan hasil (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2004. Setelah dilihat lebih lanjut lagi perkembangan Bank Jabar dan Banten memiliki prospek yang baik maka tanggal 5 April 2006 modal dasar Bank Jabar dan Banten dimana sebelumnya sebesar 2 triliun dinaikan menjadi 4 triliun.

Mengenai Perubahan Izin Usaha yaitu tindak lanjut dari SK Gubernur BI No. 9/63/kep.gbi/2007 pada bulan November 2007 adanya penggantian nama panggilan dari sebelumnya “Bank Jabar” menjadi “Bank Jabar Banten”.

Sesuai dengan Hasil (RUPS) Luar Biasa Bank Jawa Barat dan Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010 dengan perkembangan jaringan kantor yang lebih luas dan sesuai dengan Surat BI No. 12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo Bank serta Surat Keputusan No. 1337/SK/DI(R-PPN)/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Perubahan Logo dan Penyebutan Nama Serta Pemberlakuan Brand Identity Guidelines, maka pada tanggal 8 Agustus 2010 nama “Bank Jabar Banten” resmi berubah menjadi “bank bjb”.

1.6 Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Dalam suatu instansi atau perusahaan, struktur organisasi sangatlah penting dan diperlukan, dikarenakan dari struktur organisasi perusahaan tersebutlah kita dapat mengetahui dan melihat adanya pembagian tugas dan wewenang serta

tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat didalam keanggotaan perusahaan tersebut.

Adapun berikut pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang terdapat pada Bank BJB KCP Fatmawati digambarkan sebagai berikut :

1. Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) memiliki tugas utama, yaitu :
 - a. Mengawasi dan mengkoordinasi seluruh operasional kerja perbankan di Kantor Cabang.
 - b. Melakukan otorisasi sesuai kewenangan yang diberikan.
 - c. Melakukan controlling dan monitoring terhadap seluruh kegiatan operasional bank
 - d. Sebagai pembuat keputusan dalam persetujuan kredit.
 - e. Melakukan supervise di dalam menjalankan fungsi manajemen.
 - f. Melaksanakan service quality level terhadap nasabah prima dan prioritas.
2. Supervisor Operasional pada Bank BJB P Fatmawati memiliki tugas utama, yaitu:
 - a. Mengawasi setiap kegiatan atau transaksi perbankan di Bank dengan melakukan pemeriksaan dan kebenaran data yang ada
 - b. Memonitoring kecukupan modal yang dimiliki dan tersedia di Bank.
 - c. Melakukan pemeriksaan kebenaran dari suatu data atau bukti jika terjadi selisih pada saldo di Bank.
3. Account Officer (AO) atau Analis Kredit memiliki tugas utama, yaitu :
 - a. Menganalisis permohonan kredit calon debitur.
 - b. Memeriksa kembali kebenaran data-data informasi calon debitur.
 - c. Melakukan survey atas jaminan dan studi kelayakan kredit yang dimiliki calon debitur.
 - d. Melakukan analisis kredit ketika semua data-data yang diperlukan sudah terpenuhi dan terjamin kebenarannya.
 - e. Melakukan kesepakatan dan perjanjian kredit dengan debitur.
 - f. Membuat rekomendasi kredit bahwa nasabah layak untuk diberikan dan disetujui permohonan kredit yang diajukan.

4. Customer Service (CS) memiliki tugas utama, yaitu :
 - a. Memberikan pelayanan pembukaan maupun penutupan rekening (giro, tabungan, dan deposito).
 - b. Melayani Nasabah dalam hal memberikan suatu informasi kepada nasabah dan calon nasabah tentang berbagai produk bank (tabungan, giro, deposito) dan pelayanan jasa yang ditawarkan seperti transfer, inkaso, kiriman uang, dan pemindah bukuan serta layanan jasa lainnya yang dapat dilakukan oleh Bank BJB,Tbk.
 - c. Melayani keluhan ansabah serta memberikan solusi sebagai alternative untuk memecahkan masalah yang terjadi.
 - d. Melakukan penerbitan ATM
5. Teller memiliki tugas utama, yaitu :
 - a. Melakukan permintaan uang ke Kas Besar.
 - b. Melakukan penyetoran uang ke Kas Besar.
 - c. Melakukan pembukaan transaksi.
 - d. Melayani transaksi setor tuani dan pemindabukuan.
 - e. Melayani transaksi seperti transfer, kiriman uang, inkaso, dan jasa bank yang lainnya.
 - f. Membuat laporan transaksi harian di akhir hari.

1.7 Kegiatan Usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Yaitu perusahaan yang bergerak dalam lingkup penghimpunan dana berupa giro, tabungan,dan deposito dan menyalukannya kembali berupa kredit serta memberikan layanan jasa perbankan lainnya.

Berikut merupakan produk-produk dan unit usaha yang terdapat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk. Yaitu sebagai berikut :

1. Consumer Banking
 - a. Kredit
 - 1) BJB Kredit Guna Bhakti

Adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna yang diberikan oleh bank bjb kepada debitur berpenghasilan tetap yang gajinya disalurkan melalui bank bjb atau perusahaan tempat debitur bekerja memiliki perjanjian kerjasama dengan bank dimana sumber pengembaliannya berasal dari gaji debitur.

2) BJB KPR

Fasilitas kredit konsumtif yang diberikan bank bjb kepada calon debitur perorangan untuk membeli atau memiliki properti, baik pembelian baru dari pengembangan perusahaan maupun pembelian bekas dari non pengembangan perumahan.

3) BJB KPR Sejahtera FLPP

Fasilitas kredit konsumtif yang diberikan bank kepada calon debitur perorangan berupa kredit pemilikan rumah sejahtera tapak primary atau kredit pemilikan rumah sejahtera susun primary. 14

4) BJB Kredit Pra Purna Bhakti (KPPB)

Adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna yang diberikan oleh bank bjb kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa pension.

5) BJB Kredit Purna Bhakti (KPB)

Adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna yang diberikan oleh bank bjb kepada debitur pensiunan sendiri dan pensiunan janda/duda.

6) BJB Back to Back Loan

Adalah Pembiayaan dengan tujuan multiguna yang diberikan oleh bank bjb kepada debitur perorangan dengan jaminan berupa Agunan Kas.

7) BJB Wealth Management

Layanan bank bjb dalam menyediakan produk asuransi yang memberikan perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah.

8) Bancassurance

Layanan bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberikan perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah.

9) Reksa Dana

Merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.

10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Simpanan bagi pensiunan yang dapat memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan keluarganya.

2. Corporate and Commercial

Banking a. Kredit

1) Pinjaman Daerah

Fasilitas kredit yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengeluaran pembiayaan dan/ atau kekurangan arus kas.

2) BJB Kredit Investasi Umum

Fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal atau aset tetap dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi, project financing atau refinancing.

3) BJB Kredit Modal Kerja

Fasilitas kredit untuk membiayai aset lancar atau kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan karakter bisnis debit.

4) BJB Kredit Kepada BPR

Penyaluran kredit melalui linkage program kepada Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu bentuk dukungan konkret bank bjb dalam mendukung penyaluran kredit kepada sektor – sektor produktif melalui kerjasama kemitraan antara bank bjb dengan Bank Perkreditan Rakyat. 16

5) BJB Supply Chain Financing

Fasilitas kredit yang disediakan oleh bank untuk membayar tagihan para supplier.

6) BJB Lending Working Capital

Fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membayar tagihan listrik debitur kepada PT PLN (Persero).

- 7) BJB Kredit Jangka Pendek
Fasilitas kredit berjangka waktu pendek dengan media penarikan berupa promes (janji bayar).
 - 8) BJB Kredit Cash Collateral
Fasilitas kredit bagi korporasi yang disediakan oleh bank kepada debitur dengan agunan berupa simpanan di Bank.
 - 9) BJB Kredit Kepada Badan Layanan Umum Daerah
Fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan/atau investasi BLUD dalam melaksanakan kegiatan operasional dan/atau jasa.
 - 10) BJB Garansi Bank
Jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk membayar kepada penerima jaminan apabila terjamin cidera janji.
 - 11) Dukungan Keuangan Bank
Surat Dukungan Keuangan Bank diberikan kepada nasabah yang akan mengikuti proses pelelangan suatu proyek dari penyelenggara proyek instansi pemerintah ataupun swasta.
- b. Micro Banking
- 1) BJB Kredit Kepada Koperasi
Penyaluran kredit melalui linkage program kepada koperasi (Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Pegawai/Karyawan).
 - 2) BJB KKPE
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang selanjutnya disebut bjb KKPE adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Bahu Bahan Bakar Nabati.
 - 3) BJB Kredit Mikro Utama
Para pelaku usaha perorangan dalam sektor ekonomi produktif yang masuk kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang saat ini aktif menjalankan usahanya minimal 2 tahun.

4) Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM)

Para pelaku usaha perorangan dalam sektor ekonomi produktif yang masuk kategori Usaha Kecil dan Menengah yang saat ini aktif menjalankan usahanya minimal 3 tahun.

5) BJB SSRG

Adalah kredit yang mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah dengan jaminan resi gudang yang diberikan oleh bank kepada petani, kelompok tan, gabungan kelompok tani dan koperasi.

6) Kredit Cinta Rakyat

Fasilitas kredit dari bjb sahabat usaha layanan UMKM, yaitu untuk para pelaku usaha dalam sektor produktif.

7) BJB Kredit Cash Collateral

Fasilitas kredit bagi perorangan yang disediakan oleh bank kepada debitur dengan agunan berupa simpanan di bank. 19

8) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Segmen pasar kredit perorangan atau badan usaha produktif berupa usaha mikro, kecil dan menengah meliputi sektor pertanian serta sektor kelautan dan perikanan.

